



---

## Hazing Fisik sebagai Mekanisme Kekuasaan dalam Orientasi Tahanan Baru di Rutan Negara 'X'

Muhammad Alfi Maulana Ammas<sup>1</sup>, Mulyani Rahayu<sup>2</sup>

Program Studi Manajemen Pemasarakatan, Politeknik Pengayoman Indonesia<sup>1-2</sup>

Email Korespondensi: [alfimaulana55@gmail.com](mailto:alfimaulana55@gmail.com)

---

*Article received: 26 Mei 2025, Review process: 07 Juni 2025*

*Article Accepted: 28 Juni 2025, Article published: 20 Juli 2025*

---

### ABSTRACT

*Physical hazing of new detainees remains deeply rooted within the Indonesian correctional system and is often normalized as a form of social control. This study aims to identify the forms of physical hazing and the underlying factors behind its occurrence at State Detention Center 'X'. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through field observation, in-depth interviews with 16 inmates and 5 officers, and document analysis. The findings reveal that hazing is systematically executed through collective rituals, direct physical punishment, and visual symbolism intended to enforce obedience and hierarchical control. Contributing factors include the officers' desire for authority recognition, inherited violent traditions, and lack of training in humane disciplinary alternatives. The study implies an urgent need for structural and cultural reforms in correctional institutions to foster a more professional and human-centered rehabilitation process.*

**Keywords:** *physical hazing, power, correctional system, coercive discipline, new detainees*

### ABSTRAK

Praktik hazing fisik terhadap tahanan baru merupakan bentuk kekerasan yang masih mengakar dalam sistem pemasarakatan Indonesia dan sering dianggap sebagai bagian dari mekanisme pengendalian sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk hazing fisik serta faktor-faktor yang melatarbelakanginya di Rumah Tahanan Negara 'X'. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dengan 16 narapidana dan 5 petugas, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hazing dijalankan secara sistematis melalui ritual kolektif, hukuman fisik langsung, dan simbolisasi visual yang bertujuan menanamkan kepatuhan dan relasi kuasa. Faktor yang melanggengkan praktik ini antara lain adalah kebutuhan petugas akan pengakuan wibawa, tradisi kekerasan yang diturunkan, serta minimnya pelatihan mengenai disiplin humanis. Implikasi dari temuan ini menunjukkan urgensi reformasi struktural dan kultural dalam institusi pemasarakatan untuk menciptakan proses pembinaan yang lebih manusiawi dan profesional.

**Kata Kunci:** *Hazing Fisik, Kekuasaan, Pemasarakatan, Disiplin Koersif, Tahanan Baru*

## PENDAHULUAN

Fenomena kekerasan dalam bentuk perpeloncoan atau hazing terhadap tahanan baru di lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu praktik yang terus mengakar dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Meskipun sistem ini secara normatif menjunjung prinsip pembinaan, kenyataannya terdapat praktik informal yang bertentangan dengan semangat rehabilitatif, yakni kekerasan fisik yang dilakukan baik oleh petugas maupun sesama tahanan. Ritual kekerasan ini tidak hanya mencederai nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, tetapi juga menciptakan iklim represif yang menghambat tujuan utama pemasyarakatan. Di balik tembok penjara, hazing kerap menjadi mekanisme diam-diam yang dilegalkan oleh budaya institusional yang permisif terhadap kekerasan.

Beberapa penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa hazing tidak hanya dilakukan sebagai bentuk hukuman spontan, tetapi sering kali dijustifikasi sebagai bagian dari proses inisiasi dan pembentukan karakter tahanan baru. Ireland (2000) dan Nnam et al. (2022) menunjukkan bahwa bentuk kekerasan fisik, verbal, bahkan seksual terhadap tahanan baru kerap dianggap sebagai bagian dari dinamika kekuasaan. Praktik ini tidak hanya mengancam hak asasi manusia, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis yang berkepanjangan bagi korban. Dalam konteks ini, hazing menjadi instrumen yang diselewengkan untuk mempertahankan struktur kekuasaan yang timpang di dalam lembaga pemasyarakatan.

Budaya kekerasan dalam sistem pemasyarakatan diperkuat oleh lemahnya pengawasan serta terbatasnya intervensi hukum terhadap pelaku hazing. Scott (2021) menyatakan bahwa sebagian besar yurisdiksi belum memiliki sistem deteksi dan penanganan kekerasan antartahanan yang efektif. Akibatnya, praktik hazing berlangsung secara laten, sering kali dianggap sebagai "kewajaran" oleh petugas dan para penghuni rutan. Gooch (2025) menegaskan bahwa adaptasi korban terhadap kekerasan ini menunjukkan bentuk ketidakberdayaan struktural yang dilegitimasi oleh sistem itu sendiri.

Dalam konteks Indonesia, sistem pemasyarakatan masih dihadapkan pada tantangan struktural dan kultural yang memungkinkan praktik kekerasan berlangsung terus-menerus. Berbagai kasus di rutan dan lapas menunjukkan bahwa hazing terhadap tahanan baru sering kali dilakukan sebagai bentuk penegakan disiplin yang bersifat koersif. Ironisnya, praktik ini tidak hanya dilakukan oleh sesama tahanan, tetapi juga oleh aparat pemasyarakatan yang seharusnya menjadi pelindung hak-hak narapidana. Hal ini menciptakan kontradiksi antara semangat pembinaan dan praktik kekuasaan yang represif di lapangan.

Minimnya kajian akademik yang mengangkat secara spesifik praktik hazing fisik di lembaga pemasyarakatan Indonesia turut menjadi kendala dalam upaya advokasi dan reformasi. Padahal, pemahaman yang mendalam terhadap bentuk-bentuk kekerasan dan faktor penyebabnya sangat penting untuk merancang strategi intervensi yang tepat sasaran. Kurangnya literatur lokal mengenai praktik

ini juga menyulitkan pengambil kebijakan untuk menyusun pendekatan kebijakan yang berbasis bukti dan konteks nyata lapangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam bentuk-bentuk hazing fisik yang dialami oleh tahanan baru di Rumah Tahanan Negara 'X', serta mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Dengan memahami praktik ini sebagai bagian dari teknologi kekuasaan yang terstruktur, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam reformasi sistem pemasyarakatan di Indonesia, khususnya dalam menciptakan lingkungan tahanan yang lebih humanis dan bebas dari kekerasan sistemik.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam praktik hazing fisik terhadap tahanan baru di Rumah Tahanan Negara 'X'. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung di lapangan, wawancara mendalam dengan 16 narapidana yang terdiri dari kelompok tahanan baru dan lama serta 5 petugas yang terlibat dalam proses penerimaan tahanan, dan analisis dokumentasi terhadap regulasi serta catatan internal rutan. Data dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik dengan mengikuti model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola relasi kuasa dan bentuk kekerasan fisik yang terjadi secara sistematis, sekaligus mengkaji faktor penyebab yang melatarbelakanginya serta potensi intervensi yang dapat diterapkan oleh pembuat kebijakan pemasyarakatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Representasi Kekuasaan dalam Praktik Hazing Fisik

Dalam konteks penerimaan tahanan baru di Rumah Tahanan Negara 'X', praktik *hazing* fisik tidak dapat dipahami semata sebagai bentuk kekerasan insidental atau perilaku menyimpang yang dilakukan oleh segelintir oknum. Sebaliknya, praktik ini membentuk suatu mekanisme kekuasaan yang bersifat rutin, terorganisasi secara informal, dan memiliki fungsi tertentu dalam kerangka budaya. *Hazing* digunakan sebagai instrumen untuk membentuk ketertiban awal, menciptakan keteraturan, dan menanamkan pola relasi kuasa antara petugas dan tahanan baru. Proses ini dijalankan melalui tiga lapisan tindakan, ritual kolektif yang menyeragamkan, hukuman individual yang menegaskan dominasi, dan simbolisasi visual yang melucuti identitas personal.

Sejak detik pertama tahanan baru turun dari kendaraan pengangkut, mereka langsung diarahkan untuk tidak berjalan biasa, melainkan berjalan jongkok dengan kedua tangan memegang bahu rekan di depannya, membentuk barisan panjang menuju area portir dan registrasi. Gerakan ini dilakukan secara serempak dan berlangsung cukup lama, sering kali mencapai lebih dari 10 menit tanpa istirahat. Selain menciptakan tekanan fisik, tindakan ini juga memiliki

muatan simbolik: tubuh dipaksa menempuh jalur masuk rutan dalam posisi yang rendah dan menyakitkan, memperlihatkan sejak awal bahwa kontrol atas tubuh sepenuhnya berpindah tangan dari individu ke institusi. Titik inilah yang menjadi awal dari proses *depersonalisasi*, di mana seseorang tidak lagi berfungsi sebagai subjek bebas, tetapi sebagai objek dalam sistem.

Setelah proses awal tersebut, para tahanan dikumpulkan di lapangan terbuka dan diperintahkan melakukan berbagai aktivitas fisik berulang seperti push-up, sit-up, squat, dan lari kecil di tempat. Setiap gerakan diberikan dalam repetisi tinggi, sering kali hingga 10-50 kali, dengan aba-aba keras dari petugas. Menurut pengakuan narasumber, kegiatan ini sering disebut sebagai “olahraga malam”, meskipun dalam pelaksanaannya lebih menyerupai *drill* militer yang dirancang untuk menghapuskan perbedaan antar individu dan membentuk keseragaman mutlak. Tubuh para tahanan menjadi medan intervensi langsung, bukan untuk kesehatan fisik, melainkan sebagai sarana penyeragaman dan internalisasi kontrol. Dalam titik ini, petugas tidak sekadar menyuruh, tetapi juga memperagakan dan mengawasi dengan ancaman verbal yang disertai makian atau hukuman fisik tambahan jika tahanan dianggap lambat atau tidak kompak.

Formasi tubuh juga menjadi bagian penting dalam ritual kolektif. Salah satu praktik yang paling mencolok adalah barisan *human chain*, di mana para tahanan diarahkan untuk membentuk barisan panjang dengan tangan memegang bahu rekan di depannya, kepala menunduk, dan mulut mengucap “permisi, Pak” setiap kali melewati petugas. Gerakan ini bukan hanya mencerminkan kepatuhan secara eksplisit, tetapi juga menjadi mekanisme internalisasi hirarki kekuasaan. Posisi tubuh yang diturunkan secara harfiah mengajarkan sejak awal bahwa relasi antara petugas dan tahanan bukanlah hubungan yang setara, melainkan vertikal dan subordinatif. Gordon dan Stichman (2016) menjelaskan bahwa formasi semacam ini bukan hanya berfungsi sebagai pengaturan logistik, tetapi sebagai instrumen pembelajaran simbolik yang memproduksi relasi kuasa melalui tata gerak dan posisi tubuh.

Selain bentuk kolektif, kekuasaan juga tampil secara personal dan langsung melalui kekerasan fisik terhadap individu-individu yang dianggap “paling rendah” dalam hierarki moral petugas. Tamparan, pukulan, dan jambakan rambut ditujukan secara selektif kepada tahanan yang teridentifikasi sebagai pelaku tindak kejahatan tertentu seperti kekerasan seksual, pembegalan, atau pengulangan kasus narkoba. Tindakan tersebut tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi, melainkan di depan tahanan lain sebagai bentuk peringatan sekaligus “pembelajaran visual” bagi yang lain. Dalam beberapa kasus, rotan atau tongkat kecil dibawa oleh petugas sebagai alat bantu—bukan semata untuk digunakan, tetapi sebagai simbol kekuasaan itu sendiri. Seperti dicatat oleh beberapa narasumber, “melihat rotan saja sudah cukup bikin kami diam”, yang menunjukkan bahwa makna kekuasaan telah tertanam tidak hanya dalam tindakan, tetapi dalam simbol visual yang menyertainya.

Dimensi simbolik *hazing* juga tercermin dari tindakan penggundulan rambut secara massal setelah proses registrasi selesai. Rambut, sebagai bagian dari

ekspresi identitas dan simbol kebebasan personal, secara kolektif dihapuskan untuk menciptakan visualisasi keseragaman. Proses ini dilakukan tanpa pertanyaan atau persetujuan, dan sering kali dilakukan dengan alat cukur yang sama, menambah kesan "penghapusan massal" terhadap ciri khas individual. Dalam beberapa kasus, tahanan baru juga diperintahkan untuk berdiri membungkuk lalu berputar cepat dalam hitungan detik hingga kehilangan keseimbangan. Praktik ini menimbulkan disorientasi, menciptakan kondisi psikologis sementara yang membuat individu merasa kehilangan arah, tidak berdaya, dan sepenuhnya bergantung pada instruksi.

Dalam keseluruhan praktik ini, terlihat bahwa *hazing* bukan hanya bentuk kekerasan fisik belaka, melainkan proses yang secara sadar atau tidak telah dimanfaatkan sebagai instrumen produksi ketertiban dan kontrol. Tubuh tahanan menjadi titik pusat dari pelaksanaan kekuasaan: ditekan, dibentuk, dilatih, dan direkonstruksi dalam kerangka disiplin yang bertujuan untuk menciptakan subjek yang patuh, tunduk, dan kehilangan kapasitas individualnya. Seperti ditegaskan oleh Nuwer (2015), *hazing* dalam banyak institusi berfungsi bukan sekadar untuk "menguji" atau "menyambut" anggota baru, tetapi untuk memastikan bahwa struktur relasi kuasa tetap stabil dan tidak terganggu oleh kehadiran elemen-elemen baru yang belum terintegrasi.

Dengan demikian, gambaran praktik *hazing* fisik di Rutan 'X' mencerminkan bagaimana kekuasaan dijalankan dalam bentuk paling nyata dan konkret melalui tubuh manusia. Ia menjadi bagian dari sistem pembentukan keteraturan yang tidak tertulis, tetapi sangat efektif dalam menanamkan nilai-nilai institusional, baik melalui rasa sakit, kelelahan, maupun pembungkaman simbolik.

### **Faktor Struktural dan Kultural yang Menopang Hazing**

Alasan mendasar adalah keyakinan bahwa rasa hormat dari tahanan baru merupakan pilar utama ketertiban dan kontrol. Petugas merasa perlu untuk "disegani", sebuah status yang diyakini hanya bisa dicapai melalui pendekatan yang keras sejak awal. *Hazing* dipandang sebagai tindakan preventif untuk mencegah munculnya sikap "songong" atau arogan dari tahanan baru. Jika sikap meremehkan ini dibiarkan, diyakini akan menyulitkan tugas petugas di kemudian hari. Dengan demikian, perpeloncoan menjadi ritual untuk menegaskan batas kekuasaan dan memastikan marwah institusi tetap terjaga.

Kedua, *Hazing* juga berfungsi sebagai strategi pencegahan untuk mematahkan potensi pembangkangan tahanan baru sebelum berkembang. Ada kekhawatiran bahwa individu yang belum terinternalisasi dengan kultur rutan memiliki potensi besar untuk menantang otoritas. Oleh karena itu, "treatment" keras di awal, yang sering diistilahkan sebagai "mensekolahkan", dianggap krusial untuk menanamkan kepatuhan dan mempercepat adaptasi terhadap hierarki. Tindakan ini dianggap sebagai investasi untuk mencegah kekacauan yang lebih besar, dengan keyakinan bahwa "bahaya kalau nggak dikerasi macam-macam ricuh"

Selain itu, *hazing* sebagai bentuk *shock therapy* dengan tujuan utama untuk menciptakan efek jera yang mendalam dan bertahan lama. Tujuannya adalah untuk menanamkan rasa takut yang begitu kuat sehingga tahanan akan patuh secara otomatis. Seorang petugas menyatakan bahwa setelah diberi perlakuan keras, seorang tahanan "nggak salah aja udah takut ke sini, dipanggil sama kita keamanan". Ketakutan ini diharapkan menjadi pengingat permanen akan superioritas petugas dan konsekuensi berat dari setiap pelanggaran, baik yang nyata maupun yang potensial.

Faktor krusial yang turut melanggengkan praktik *hazing* fisik di rutan adalah keterbatasan pengetahuan dan keterampilan petugas dalam menerapkan metode disiplin yang lebih humanis namun tetap efektif. Ketergantungan pada pendekatan kekerasan sebagian besar bersumber dari minimnya pelatihan teknis serta ketiadaan model pembinaan alternatif yang dapat diakses dan dipercaya. Meskipun secara normatif *Standard Operating Procedure* (SOP) terkait perlakuan terhadap tahanan telah tersedia, pelaksanaannya kerap terpinggirkan oleh pola-pola tradisional yang diwariskan dari satu generasi petugas ke generasi berikutnya.

Dalam praktiknya, kekuasaan dijalankan lebih berdasarkan kebiasaan institusional ketimbang refleksi kritis terhadap prinsip-prinsip pemasyarakatan. Berbagai upaya reformasi yang pernah dijalankan sering kali bersifat parsial dan tidak disertai strategi perubahan budaya organisasi yang komprehensif. Akibatnya, keyakinan bahwa hanya pendekatan koersif yang efektif dalam menciptakan keteraturan justru semakin mengakar kuat di tingkat pelaksana, dan membuka ruang bagi kekerasan untuk terus dianggap wajar dan fungsional dalam sistem penerimaan tahanan baru.

### **Strategi Intervensi Sistemik terhadap Budaya Kekerasan**

Dibutuhkan strategi intervensi yang menysasar langsung pada akar struktural, kultural, dan individual yang melanggengkan kekerasan sebagai bagian tak terucap dari sistem kerja pemasyarakatan. Intervensi tersebut harus dirancang secara menyeluruh dan sistematis, bukan sekadar menyisipkan pelatihan sesekali atau mengganti narasi tanpa menyentuh realitas kerja di lapangan.

Langkah pertama adalah melakukan intervensi struktural untuk memutus mata rantai pewarisan budaya kekerasan yang selama ini berjalan secara informal di antara para petugas. Budaya organisasi dalam pemasyarakatan selama ini cenderung mengandalkan sistem belajar horizontal: petugas junior belajar dari petugas senior bukan melalui pelatihan formal, melainkan lewat observasi langsung atas apa yang mereka lihat di lapangan. Jika yang diamati dan dicontoh adalah praktik kekerasan yang dianggap "wajar", maka kekerasan akan terus direproduksi dan diwariskan sebagai bentuk pengetahuan terapan. Oleh karena itu, institusi pemasyarakatan harus segera menyusun ulang pola kaderisasi petugas dengan membentuk program mentoring formal yang mempertemukan petugas-petugas baru dengan mentor-mentor yang telah diseleksi berdasarkan

---

integritas, kedewasaan emosional, dan pemahaman mereka terhadap pendekatan pemasyarakatan berbasis kemanusiaan. Dalam sistem ini, transfer nilai tidak lagi terjadi secara liar, melainkan dikendalikan melalui relasi pembelajaran yang sehat dan konstruktif.

Selain itu, untuk mencegah tumbuhnya subkultur tertutup yang menjadikan kekerasan sebagai norma tak tertulis, perlu diterapkan kebijakan rotasi rutin terhadap petugas, terutama mereka yang bertugas di unit penerimaan tahanan baru. Bagian ini adalah titik paling rawan dari rantai proses pemasyarakatan, karena di sinilah relasi kekuasaan pertama kali dibentuk dan dipertontonkan secara konkret kepada tahanan. Tanpa rotasi yang terjadwal dan berbasis evaluasi kinerja, akan sangat mudah bagi suatu tim untuk membangun solidaritas sempit berbasis praktik koersif. Rotasi petugas, jika dikombinasikan dengan sistem penilaian kinerja berbasis umpan balik (misalnya dari rekan kerja dan hasil pengawasan internal), dapat mendorong pembaruan nilai dan mencegah terbentuknya zona nyaman bagi praktik kekerasan yang tidak terdeteksi secara administratif.

Langkah kedua menysar aspek kapasitas individual petugas, yang selama ini menjadi salah satu titik paling lemah dalam penanganan *hazing*. Banyak petugas sebenarnya menyadari bahwa kekerasan bukan satu-satunya pilihan, tetapi tidak memiliki alternatif karena mereka tidak pernah diberi perangkat keahlian yang relevan. Dalam kondisi penuh tekanan dan ketidakseimbangan jumlah antara petugas dan tahanan, respons instingtif yang muncul adalah intimidasi, bentakan, atau tindakan fisik. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas petugas harus dilakukan dengan pelatihan intensif dan berkelanjutan, yang fokus pada teknik disiplin non-kekerasan. Materi yang wajib dimasukkan antara lain: komunikasi asertif, manajemen emosi dalam situasi konflik, serta teknik de-eskalasi dalam konteks penegakan aturan tanpa menimbulkan resistensi. Lebih jauh, perlu disusun modul khusus tentang pengendalian massa secara profesional, yang tidak bergantung pada tekanan verbal atau fisik, melainkan pada strategi komunikasi kolektif dan kepemimpinan lapangan yang tenang namun tegas.

Yang terpenting, pelatihan ini tidak boleh berhenti di level kognitif atau teori belaka. Pendekatan terbaik adalah pelatihan berbasis simulasi, studi kasus, dan refleksi pengalaman nyata. Dengan mempertemukan petugas dengan situasi buatan yang meniru realitas kerja di lapangan, mereka akan lebih mudah menginternalisasi metode baru dan menyadari bahwa otoritas tidak harus dibangun melalui ketakutan, tetapi bisa ditegakkan melalui sikap profesional dan konsisten terhadap aturan.

Langkah ketiga adalah reformasi pada dokumen operasional institusi, khususnya *Standard Operating Procedure* (SOP) terkait penerimaan tahanan. Selama ini, banyak SOP hanya mencantumkan prosedur administratif tanpa secara eksplisit mengatur atau melarang praktik kekerasan. Ini menciptakan ruang abu-abu yang membuka peluang terjadinya kekerasan yang tidak tercatat. Oleh karena itu, SOP perlu ditulis ulang secara operasional, dengan mencantumkan larangan eksplisit terhadap seluruh bentuk kekerasan fisik dan verbal, disertai dengan

panduan rinci mengenai bagaimana orientasi awal tahanan seharusnya dilakukan: melalui penyampaian informasi, penanaman nilai-nilai kedisiplinan secara edukatif, dan pembentukan kesepahaman atas aturan yang berlaku di dalam rutan. Dengan adanya SOP yang jelas dan mengikat, petugas memiliki pegangan kerja yang sah.

Secara keseluruhan, strategi intervensi untuk menghapus praktik *hazing* fisik terhadap tahanan baru harus bergerak di tiga level: struktural, individual, dan regulatif. Hanya dengan pendekatan menyeluruh yang melibatkan perubahan budaya, peningkatan kapasitas teknis, dan penataan ulang sistem kerja, praktik kekerasan dapat dihentikan dan digantikan dengan pola pembinaan yang sejati. Tantangannya memang besar, tetapi jika tidak segera dilakukan, lembaga pemasyarakatan akan terus gagal menjalankan mandat moralnya, yakni mengubah individu menjadi lebih baik, bukan lebih rusak karena trauma kekuasaan yang brutal.

## SIMPULAN

Kesimpulan, praktik *hazing* fisik terhadap tahanan baru di Rumah Tahanan Negara 'X' merupakan mekanisme kekuasaan yang terstruktur dan dilembagakan dalam budaya institusional pemasyarakatan, bukan sekadar bentuk kekerasan insidental. Tubuh tahanan dijadikan medium pengendalian melalui ritual kolektif, hukuman langsung, dan simbolisasi identitas, yang secara sistematis menanamkan kepatuhan dan hierarki kekuasaan. Fenomena ini tumbuh dari akumulasi tradisi koersif, kebutuhan simbolik atas wibawa petugas, serta minimnya pendekatan disipliner yang humanis. Oleh karena itu, dibutuhkan intervensi menyeluruh berupa reformasi kelembagaan, peningkatan kapasitas petugas, dan pembenahan prosedural guna membangun sistem pemasyarakatan yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pembinaan manusiawi sejak hari pertama masa tahanan dimulai.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

## DAFTAR RUJUKAN

- Gordon, J. A., & Stichman, A. J. (2016). The influence of rehabilitative and punishment ideology on correctional officers' perceptions of informal bases of power. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 60(12), 1409-1429.
- Gooch, K. (2025). 'They'll Do Harsh Shit in Here': The Anatomy and Culture of Prison Victimisation. In *Prison Violence: The Search for Recognition and Respect* (pp. 61-95). Cham: Springer Nature Switzerland.

- 
- Ireland, J. L. (2000). Bullying among prisoners: A review of research. *Aggression and Violent Behavior*, 5(2), 201–215. [https://doi.org/10.1016/S1359-1789\(98\)00031-7](https://doi.org/10.1016/S1359-1789(98)00031-7)
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). Sage Publications.
- Nnam, M. U., Omeh, P. A., & Ugwu, C. E. (2022). Understanding violence and victimization in custodial centres: Insights from Nigerian correctional facilities. *Journal of Interpersonal Violence*, 37(5-6), NP3370–NP3392.
- Nuwer, H. (2015). Hazing in fraternities and sororities. In J. D. Wright (Ed.), *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences* (2nd ed., pp. 644–647). Elsevier.
- Rostami, A., & Mondani, H. (2020). Prison subculture and correctional legitimacy: A systematic review. *Journal of Criminal Justice*, 67, 101699.
- Scott, C. R. (2021). Dark Behaviours and Shadowy Places: Bullying, Abuse and Harassment as Linked to Hidden Organizations. *Special Topics and Particular Occupations, Professions and Sectors*, 135–159.
- Syafrudin, M., & Prakoso, L. Y. (2020). Kekerasan sistemik dalam sistem masyarakatan di Indonesia: Studi terhadap pelanggaran HAM di lembaga masyarakatan. *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 11(2), 151–165.
- Wismanto, D. (2019). Internalisasi nilai dalam sistem masyarakatan: Kritik atas praktik pembinaan yang koersif. *Jurnal Masyarakatan*, 15(1), 45–60.